ANALISIS PENGARUH JUMLAH PEKERJA, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 1999-2013 (Studi pada Malang Raya)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Pahala Bellarminus Lumban Tobing
NIM. 115020100111063

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PEKERJA, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 1999-2013 (Studi pada Malang Raya)

Pahala Bellarminus Lumban Tobing
Dr. Moh. Khusaini SE., M.Si., MA.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email : pahalatobing1@gmail.com

ABSTRAK

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan otonomi daerah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PADdiartikan sebagai penerimaan dari somber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitianini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Faktor-faktor tersebutmeliputi : jumlah pekerja, pengeluaran pemerintah, dan PDRB. Data yang diamati dalampenelitian ini adalah data time-series periode 1999-2013 dan data cross-section Malang Raya yang meliputi : Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Model estimasi yang digunakanadalah regresi berganda menggunakan metode panel yang ditransformasikan ke bentuk logaritma.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB secara uji parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD, sedangkan variabel jumlah pekerja tidak signifikan terhadap PAD. Secara uji simultan model yang digunakan sangat baik digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Kata kunci: otonomi daerah, PAD, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, PDRB.

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mensyaratkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus didukung oleh dukungan personil, peralatan, dan pembiayaan yang memadai. Dengan terpenuhinya syarat undang-undang tersebut, pemerintah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dilimpahkan.

Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat telah membagi berbagai sumber pembiayaan kepada daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dilimpahkan. Menurut ketentuan yang ada dalam pasal 2 undang-undang nomor 33 tahun 2004 pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari a) pendapatan asli daerah; b) dana perimbangan; dan c) lain lain pendapatan yang sah.

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan pembangunan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Daerah Otonom harus mampu menggali sumber sumber keuangannya, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerahnya (Mahmudi, 2009:3).
Santosa dan Rahayu (2005) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat

kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. PAD yang kecil akan mempersulit daerah dalam melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Padahal dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka setiap daerah dituntut untuk mengoptimalkan peran PAD di dalamnya.

Sumber utama PAD adalah pajak daerah (Mahmudi 2009:21). Pajak daerah merupakan salah satu dalam sub-komponen dalam pendapatan lain-lain yang merupakan unsur penerimaan dalam pendapatan asli daerah. Mengingat potensi yang dimiliki cukup besar dalam menyumbang penerimaan bagi PAD dengan perhitungan dan estimasi yang tepat diharapkan akan didapat potensi yang terukur secara layak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penduduk yang bekerja merupakan salah satu unsur penting dalam penerimaan pajak. Penduduk yang bekerja (pekerja) merupakan potensi (*tax base*) bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan pendapatan asli daerah. Dengan bertambahnya penduduk yangbekerja (pekerja) akan meningkatkan produksi. Di samping itu dengan adanya pendidikan dan pelatihan kerja akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik dan menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertumbuhan pekerja, sehingga pajak yang ditarik dari penduduk yang bekerja pun akan lebih optimal hasilnya.

Tingginya jumlah pekerja secara otomatis akan meningkatkan mobilitas kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi suatu daerah secara umum dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Badan Pusat Statistik). Dari definisi tersebut PDRB mempunyai hubungan dengan peningkatan penerimaan PAD. PAD berupa pajak daerah tercermin di dalam PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah. PDRB berfungsi sebagai: a) Indikator tingkat kemakmuran; b) Indikator pertumbuhan pendapatan regional per kapita; c) indikator tingkat kemakmuran; d) indikator tingkat inflasi; e) indikator struktur perekonomian; dan f) indikator hubungan antar sektor.

Selain jumlah pekerja sebagai *tax base* dan PDRB sebagai gambaran produktivitas daerah yang berimplikasi pada PAD, terdapat juga komponen penting penunjang PAD yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang berupa pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Ketika kesejahteraan meningkat, maka secara otomatis kemampuan masyarakat untuk membayar pajak juga akan meningkat, yang nantinya berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Meskipun PAD diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pembangunan, namun saat ini kondisinya masih kurang memadai, artinya bahwa proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif rendah, contohnya pada daerah Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

Secara empiris, jika melihat data pada gambar 1 nilai PAD Malang Raya pada tahun 2013 menunjukkan bahwa masih rendahnya PAD Malang Raya dibandingkan PAD kota/kabupaten lainnya di Jawa Timur. Padahal seperti yang diketahui, daerah-daerah Malang Raya merupakan daerah yang potensial dalam sektor pariwisata serta sektor industri yang seharusnya memiliki kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah berupa pajak.

Gambar 1. :Distribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jawa Timur Tahun 2013

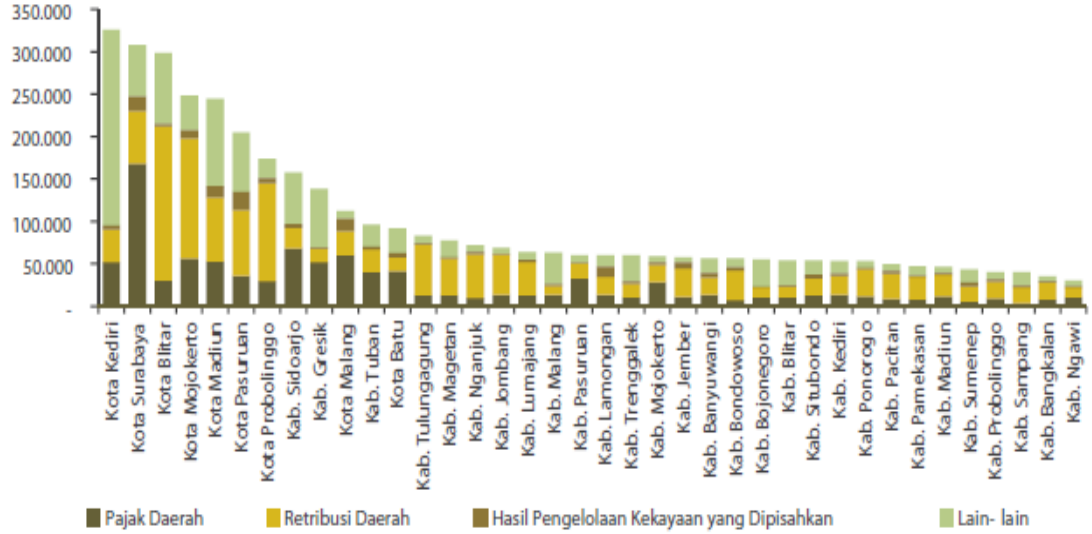

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2014

Dapat kita lihat juga pada gambar 2 nilai PAD di Malang Raya tahun 2013 menunjukkan bahwa PAD belum berkontribusi baik terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Pada tahun 2013 Total Penerimaan Daerah (TPD) masih didominasi oleh transfer pusat. PAD Kota Malang sebesar Rp. 317,859,423,684.26 sedangkan transfer pusat sebesar Rp. 1,164,375,000,745.00; Kabupaten Malang sebesar Rp. 260,582,631,320 sedangkan transfer pusat sebesar Rp. 1,700,485,365,220.00 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 566,933,236,480; PAD Kota Batu sebesar Rp. 59,674,741,826.29 sedangkan transfer pusat sebesar Rp. 446,587,901,437.00 dan pendapatan lain lain sebesar Rp. 81,732,785,675.00. Pada gambar 1.2 terbukti bahwa PAD Malang Raya belum dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian maka perlu dicari potensi-potensi daerah Malang Raya untuk meningkatkan PAD dari pajak, retribusi, laba BUMD maupun PAD lain yang sah.

Gambar 2. : Proporsi PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah Malang Raya Tahun 2013

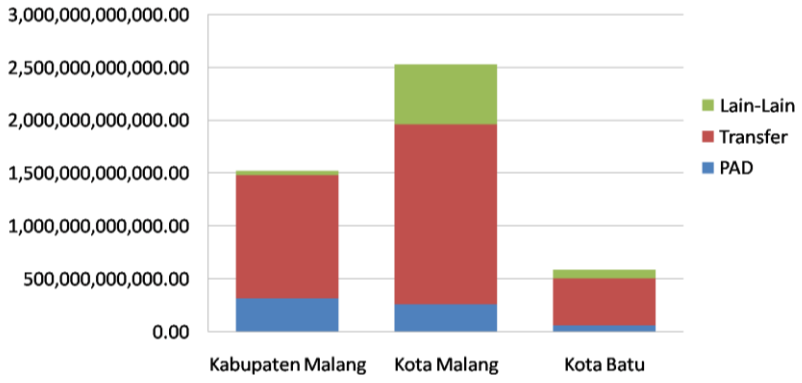

Sumber: Badan Pusat Statistik Malang 2014

Melalui berbagai data di atas, penulis menjadikannya sebagai alasan secara empiris dalam pemilihan Malang Raya sebagai studi dalam penelitian ini. Selain alasan secara empiris, terdapat juga alasan secara statistika yaitu untuk melakukan regresi linear dibutuhkan data observasi minimal sebanyak 30 observasi agar hasilnya lebih baik menurut Roscoe (1975) dalam Sekaran (1992:252), dengan memilih Malang Raya sebagai studi, maka dengan periode penelitian selama 15 tahun sudah didapatkan data lebih dari 30 observasi.

B. KERANGKA TEORITIS

PAD

Kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meruipakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom.Kemandirian daerah otonom diukur melalui seberapa besar peranan PAD dalam membiayai pengeluran daerah, khususnya belanja rutin daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam APBD maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, sehingga ketergantungan dana dari pemerintah pusat semakin kecil begitu juga sebaliknya, semakin rendah kontribusi PAD dalam APBD semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V pasal 6, terdiri dari :

a) Pajak daerah;
b) Retribusi daerah;
c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d) Lain lain PAD yang sah.

Sumber-sumber PAD di atas memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan.Namun demikian kontribusi terbesar dalam menyumbang penerimaan PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.Sebagai sumber utama PAD, pemerintah senantiasa mendorong peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan keadaan.Saat ini ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000.

Pengaruh Jumlah Pekerja Terhadap PAD

Menurut Adam Smith dalam Patricia (1991:128), tenaga kerja merupakan modal dan potensi sumber daya manusia bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan penduduk tinggi, dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Besarnya jumlah penduduk dapat meningkatkan pendapatan,semakin besar jumlah penduduk semakin besar juga pendapatan yang dapat ditarik.

Menurut Badan Pusat Statistik (2014) penduduk usia kerja adalah penduduk di atas sepuluh tahun keatas, yang dibedakan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang berumur sepuluh tahun keatas dan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam angkatan kerja.Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur sepuluh tahun keatas yang kegiatannya hanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah angkatan kerja

Pengaruh PDRB Terhadap PAD

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan yang fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktifitas masyarakat.

Menurut Siregar (2004) dalam Chakim (2011), analisis keterkaitan antara perkembangan penerimaan PAD dengan PDRB dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ln PAD = ao + a1 Ln PDRB + e

Dimana:

PAD = Nilai PAD suatu daerah
PDRB = Nilai PDRB suatu daerah
ao = Intercept / konstanta
a1 = Koefisien elastisitas perkembangan penerimaanPAD terhadap perkembangan PDRB
e = Error term

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh Guritno (1994:169) dalam Santosa dan Rahayu (2005) dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:

1. Model Pembangunan Terhadap Perkembangan Pemerintah

Teori ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Santosa dan Rahayu 2005). Yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Rostow dan Musgrave menyatakan perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan,kesehatan, pendidikan, dan lain lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, jaminan sosial, pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah tersebut, maka disimpulkan bahwa dengan meningkatnya infrastruktur (investasi pemerintah) maka kegiatan ekonomi juga akan meningkat. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, potensi pajak yang didapat pemerintah daerah akan bertambah banyak dan bervariasi yang nantinya berpengaruh pada peningkatan PAD.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapitanya meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “The Law of Expanding State Expenditure”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang).Dari hukum tersebut dapat simpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan. Ketika pendapatan meningkat maka secara otomatis kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri akan memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pajak daerah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah nantinya akan berpengaruh pada peningkatan PAD.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran.Masyarakat dilain pihak tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktifitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak

berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah tidak berbentuk garis lurus tetapi berbentuk seperti tangga yang ditunjukkan gambar 3.

Gambar 3. :Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

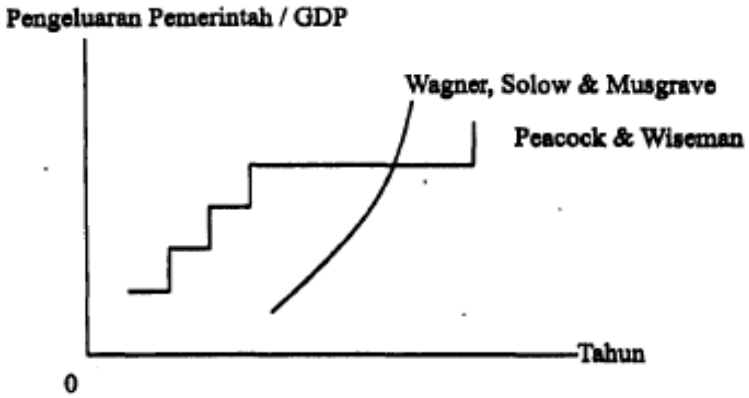

Gambar
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Sumber : Santosa dan Rahayu, 2005

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai fasilitator dan katalisator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pengeluaran-pengeluaran tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi (Sukirno, 1994) dalam Santosa dan Rahayu (2005).

Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan kajian teori yang telah disampaikan, maka penelitian ini dapat dibangun sebuah kerangka pemikiran penelitian pada gambar 4.

Gambar 4. Kerangka Pikir

C. METODE PENELITIAN

Teknik analisa data yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana pendekatan kuantitatif adalah menjelaskan objek studi berdasarkan data dan fakta yang ada, kemudian dianalisis secara deskriptif dalam rangka menjawab permasalahan penelitan. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan penggambaran objeknya dilakukan secara statistik. Pendekatan ini diharapkan dapat memaparkan tentang kondisi objek yang diteliti dengan melihat jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah berupa belanja langsung, dan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Malang Raya.

Dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan analisis regresi linear berganda. Regresi data panel digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apakah faktor jumlah penduduk yang bekerja (pekerja), pengeluaran pemerintah, dan PDRB mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di Malang Raya. Data panel (panel data) merupakan gabungan data cross section dan data time series. Dengan kata lain, data panel merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Gujarati (2010), beberapa keuntungan penggunaan data panel sebagai berikut:

1) Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model.
2) Data panel mampu mengindikasikan dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diperoleh dengan data cross section murni atau time series murni.
3) Data panel mampu mengurangi kolinieritas antar variabel.
4) Data panel dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
5) Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit data lebih banyak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan dari data time series dan cross section. Data time series yang digunakan adalah data tahunan selama 15 tahun mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, dan data cross section terdiri dari 3 kota, yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, namun Kota Batu baru berdiri tahun 2002 sehingga data yang didapat sebanyak 42 observasi (unbalanced data). Data yang digunakan unbalanced data, sehingga model yang digunakan adalah Model Pooled Least Square (PLS) menggunakan model logaritma (log).

Pada variabel PAD, PAD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total pendapatan asli daerah yang terealisasi di Malang Raya. Total PAD diperoleh dari: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD (hasil investasi), dan lain-lain PAD yang sah.

Pada variabel jumlah penduduk, penelitian ini menggunakan jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha utama di Malang Raya (Badan Pusat Statistik). Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, jumlah penduduk yang bekerja di Malang Raya selalu mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4%.

Pada variabel pengeluaran pemerintah, penelitian ini menggunakan jumlah total belanja langsung APBD Malang Raya. Menurut Mahmudi (2009:97) belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Pengukuran pengeluaran pemerintah dinyatakan dalam jutaan rupiah per tahun. Jenis belanja langsung meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pada variabel PDRB yang dipakai dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik). Pengukuran PDRB ADHK dinyatakan dalam jutaan rupiah per tahun

Adapun bentuk persamaan dari penelitian ini yaitu :

$$\text{LnPADit} = \beta 0 + \beta 1\ \text{LnJUMLAH PENDUDUKit} + \beta 2\ \text{LnPENGELUARAN PEMERINTAHit} + \beta 3\ \text{LnPDRBit} + \varepsilon \text{it}$$

Dimana :

PAD	= Pendapatan Asli Daerah (Rp)
Jumlah Penduduk	= Jumlah penduduk yang bekerja (Jiwa)
Pengeluaran Pemerintah	= Belanja Langsung (Rp)
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto ADHK (Rp)
εit	= Komponen error

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode panel dalam analisisnya, dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Estimasi Model

Variabel	Probabilitas	Korelasi
Jumlah Penduduk	0,713	-
Pengeluaran Pemerintah	0,931	+
PDRB	0,253	+
R^2	89,97%	

*Sumber :*Eviews 6, diolah (2015).

Berdasarkan hasil estimasi, maka diperoleh bentuk persamaan dari penelitian ini yaitu :

LnPADit= 0.727 + -0.095 Ln JUMLAHPENDUDUK + 0,242 Ln PENGELUARAN PEMERINTAH+ 0,881LnPDRB+ εit

Interpretasi :

1) Nilai koefisien konstanta sebesar 0.727 dan bertanda positif artinya, bahwa dengan asumsi tanpa adanya pengaruh variabel independen, maka nilai dari PAD adalah sebesar 0.727 poin.

2) Nilai koefisien jumlah penduduk sebesar -0.095 artinya, setiap terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1% maka akan menurunkan nilai PAD sebesar 0.095 poin.

3) Nilai koefisien pengeluaran pemerintahsebesar 0.242 dan bertanda positif artinya, setiap terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan meningkatkan nilai PAD sebesar 0.242 poin.

4) Nilai koefisien PDRB sebesar 0.881 dan bertanda positif artinya, setiap terjadi peningkatan PDRB sebesar 1% akan meningkatkan nilai PAD sebesar 0.881 poin.

5) Nilai R^2 sebesar 0.8997 artinya bahwa varian variabel independen (jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan PDRB) mampu menjelaskan varian variabel dependen (PAD) sebesar 89.97%, dan sisanya sebesar 10,03% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel diluar model.

Berdasarkan hasil estimasi dan uji hipotesis secara parsial variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah pengeluaran pemerintah dan PDRB terhadap pertumbuhan PAD, sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan .

Variabel pengeluaran pemerintah dengan probabilitas 0.0003 menunjukkan pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan PAD. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang dibangun dan hasil temuan Santosa dan Rahayu (2005) yang membuktikan secara statistik variabel pengeluaran pemerintah yaitu belanja langsung secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Variabel PDRB dengan probabilitas 0.0000 menunjukkan pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan PAD. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang dibangun dan juga hasil temuan Santosa dan Rahayu (2005) yang membuktikan secara statistik variabel PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Variabel jumlah penduduk dengan probabilitas 0,2847 tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan PAD.

Secara Uji F (simultan), variabel independen yaitujumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD.

Nilai R^2 yang juga tinggi yaitu sebesar 89,97% menunjukkan bahwa varian variabel independen (jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan PDRB) dapat menjelaskan varian variabel dependen pertumbuhan PAD sebesar 89,97%. Artinya model ini sangat baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD.

E. KESIMPULAN

PAD Malang Raya dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah berupa belanja langsung dan PDRB. Hal ini telah dibuktikan melalui hasil penelitian, pernyataan ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa PAD dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan PDRB.

Pengeluaran pemerintah berupa belanja langsung efektif dalam meningkatkan PAD. Pembangunan infrastruktur berupa jalan, pendidikan, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan bagian dari belanja langsung sangat penting dalam mendorong peningkatan PAD. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan belanja langsung signifikan terhadap PAD tentu saja sejalan dengan pernyataan sebelumnya bahwa belanja langsung merupakan stimulus dalam meningkatkan PAD. Hal ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan pengeluaran pemerintah merupakan pengaruh untuk meningkatkan PAD.

Hasil penelitian menunjukkan PDRB merupakan pengaruh dalam meningkatnya PAD. Semakin banyak jumlah PDRB maka jumlah PAD semakin meningkat, karena PDRB selain merupakan indikator pertumbuhan ekonomi juga sebagai indikator tingkat kemakmuran. Pernyataan ini sejalan dengan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa PDRB merupakan pengaruh dalam meningkatkan PAD.

Jumlah penduduk yang bekerja (pekerja) kurang efektif dalam meningkatkan PAD. Semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja belum tentu PAD yang dihasilkan meningkat. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya PAD.

DAFTAR PUSTAKA

Ainun, Yatimul. 2012. Hari Ini Warga Kota Batu Memilih Walikota. (regional.kompas.com/read/2012/10/02/09022961/) diakses pada 5 Januari 2014.

Ajija, Shochrul R. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta:Salemba Empat.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. Malang Dalam AngkaTahun 1999 s/d 2014. Kota Malang:Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 1999 s/d 2014. Kabupaten Malang:Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Kota Batu. Batu Dalam Angka Tahun 1999 s/d 2014. Kota Batu:Badan Pusat Statistik

Chakim, Ali. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. Tesis. Surakarta:Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Christopher Silver. 2003. Do the donors have it right? decentralization and changing local governance in indonesia. Annals Of Regional Science, Vol 37:421-434

Dajan, Anto.1984. Pengantar Metode Statistik. Jilid 2. Jakarta:LP3ES.

Departemen Dalam Negeri. 1991. Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung-jawab. Jakarta:Litbang Depdagri.

Dwi, Asri Jatnika. 2013. Kontribusi keuntungan PDAM tirtawening terhadap pendapatan asli daerah kota bandung tahun 2011-2012. Jurnal Ekono Insentif Kopwil 4, Vol.7, (No.2):23-31

Gujarati, N. Damodar. 2010. Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 1 (Edisi Kelima). Jakarta:SalembaEmpat.

Gujarati, N. Damodar. 2010. Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2 (Edisi Kelima). Jakarta:SalembaEmpat.

Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta:Erlangga.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:Andi.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sachari, Agus. 2011. Desain dan Permasalahan Pembangunan,Menjemput Era Perekonomian Kreatif di Masa Depan. Bandung:ITB.

Santosa dan Rahayu. 2005. Analisis pendapatan asli daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten kediri. Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 2, (No.1):9-18

Sachs, Jefrey D. 2001. The Curse of natural Resources. European Economic Review Vol. 45:827-838

Seher, Nur Sulku. 2010. Health care expenditures and gross domestic product, the Turkish Case. Eur J Health Vol .2:29-38

Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta:Salemba Empat.

Thesaurianto, Kuncoro. 2007. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. Tesis. Semarang:Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Todaro, Michael P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Edisi Ketujuh, Jilid 1 dan 2, Alih bahasa oleh Burhanuddin Abdullah dan Harris Munandar). Jakarta:Erlangga.

Walsh, Thomas A. 2008. Decentralization and Natural Resource Management: New Opportunities for Communities in The Upper Jeneberang Watershed, South Sulawesi, Indonesia?. Thesis. University of Guelph Canada.

Werhane, Patricia. 1991. Adam Smith and His Legacy For Modern Capitalism. New York:Oxford University Press, Inc.

Wahyuni, Sri. 2008. Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Karang Anyar Tahun 1999-2010. Tesis. Surakarta:Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.